

ABSTRAK

Anggota DPR merupakan wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat, anggota DPR mempunyai hak imunitas untuk bebas dalam berpendapat untuk menjalankan tugas dan kewenangannya, anggota DPR tidak dapat digugat secara pidana maupun perdata dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Kemajuan sebuah teknologi membuat perkembangan di dalam parlemen menjadi semakin luas. Dalam kasus yang menjerat Arteria Dahlan dalam rapat kerja bersama dengan Jaksa Agung menjadikan gambaran adanya kekosongan dalam batasan hak imunitas dan juga regulasi media sosial dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undang dan konseptual. Penelitian ini menemukan bahwa Arteria Dahlan tidak dapat dipidana dalam tindak pidana ujaran kebencian dikarenakan adanya hak imunitas yang melekat, sehingga diperlukannya kebijakan baru terkait batasan hak imunitas dan penambahan klausul terkait media sosial dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Hal tersebut bertujuan patennya batasan hak imunitas yang mengikat anggota DPR dan media sosial.

Kata Kunci : Ujaran Kebencian, Hak Imunitas Anggota DPR, Media Sosial

ABSTRACT

Members of the DPR are representatives of the people who are elected by the people, members of the DPR have the right of immunity to be free in expressing opinions in carrying out their duties and authorities, and members of the DPR cannot be sued criminally or civilly for carrying out their duties and authorities. Advances in technology make developments in parliament more extensive. In the case that ensnared Arteria Dahlan in a joint working meeting with the Attorney General, it illustrates that there is a vacuum in the limits of immunity rights and also social media regulations in Law Number 17 of 2014 concerning the People's Consultative Assembly, the People's Representative Council, and the Regional Representative Council. This study uses normative research, with a statutory and conceptual approach. This research found that Arteria Dahlan could not be convicted of hate speech crimes due to the inherent right of immunity, so a new policy was needed regarding the limitation of immunity rights and the addition of clauses related to social media in Law Number 17 of 2014 concerning the People's Consultative Assembly, the Representative Council People, and the Regional Representative Council. This is intended to patent limits on immunity rights that bind members of the DPR and social media.

Keywords: Hate Speech, Immunity Rights of DPR Members, Social Media